

Framing Language Strategies in *Detik.com*'s News Coverage of Protests Against the DPR Allowance Increase

Strategi Berbahasa *Framing* dalam Pemberitaan Aksi Penolakan Tunjangan Anggota DPR pada *Detik.com*

Aqilah Iffatul Ulya^{1*} Dadang S. Anshori² Encep Kusumah³

Universitas Pendidikan Indonesia^{1,2,3}

*Corresponding author. Email: aqilahiffatululya@upi.edu

doi: 10.24036/jbs.v14i1.136327

Submitted: Nov 9, 2025

Revised: Mar 7, 2026

Accepted: Mar 30, 2026

Abstract

The action of rejecting the DPR allowances has sparked a variety of perspectives in media coverage, one of which is reflected in the language used to report on the protests. This study aims to analyze the language used by *detik.com* in framing the rejection of DPR allowances and explain how the use of language shapes certain meanings and biases in news coverage. This study uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of documentation and note-taking. The data consists of five *detik.com* news articles that were purposively selected related to the rejection of the DPR allowance during the period of August 25—30. The analysis was conducted by classifying language elements (diction, phrases, clauses, sentences, coherence, and themes) based on Pan and Kosicki's four framing structures (syntax, script, thematic, and rhetorical). The results of the study show the dominance of the use of diction that implies rioting, the composition of titles that emphasize chaos, and narratives that focus on the destructive actions of the masses so that in the news, the action is framed as rioting in public spaces. This study concludes that the five news reports not only use language as a tool to communicate reality, but also symbolically to construct and delegitimize the action of rejecting the DPR allowance through negative framing in their reporting. These findings enrich the application of Pan and Kosicki's framing model in the analysis of political media discourse in Indonesia and are expected to serve as material for reflection for journalists in their use of language and in constructing balanced narrative structures so as not to appear to delegitimize social protest actions.

Key words: *framing analysis; language strategies; political news; protest against DPR allowance increase*

Abstrak

Aksi penolakan tunjangan DPR menghadirkan beragam sudut pandang pemberitaan media, salah satunya melalui penggunaan bahasa dalam memberitakan aksi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bahasa yang digunakan *detik.com* dalam membingkai aksi penolakan tunjangan DPR serta menjelaskan bagaimana penggunaan bahasa tersebut membentuk makna dan bias tertentu dalam pemberitaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan simak catat. Data berupa lima berita *detik.com* yang dipilih secara purposif terkait aksi penolakan tunjangan DPR periode 25—30 Agustus. Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan unsur-unsur bahasa (diksi, frasa, klausa, kalimat, koherensi, dan tema) berdasarkan empat struktur *framing* Pan dan Kosicki (sintaksis, skrip, tematik, dan retorik). Hasil penelitian menunjukkan dominasi penggunaan diksi yang bermakna kerusuhan, penyusunan struktur judul yang menekankan kericuhan, dan narasi yang memusatkan perhatian pada tindak destruktif massa sehingga dalam pemberitaan, aksi terbingkai layaknya kerusuhan di ruang publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelima berita tersebut tidak hanya menggunakan bahasa sebagai alat mengomunikasikan realitas, tetapi juga simbolis untuk mengonstruksi dan mendelegitimasi aksi penolakan tunjangan DPR melalui *framing* negatif dalam pemberitaannya. Temuan ini memperkaya penerapan model *framing* Pan dan Kosicki dalam analisis wacana media politik di Indonesia serta diharapkan menjadi bahan refleksi bagi praktik jurnalis dalam menggunakan bahasa serta menyusun struktur narasi yang berimbang agar tidak terkesan mendelegitimasi sebuah aksi protes sosial.

Kata kunci: *analisis framing; demonstrasi penolakan tunjangan DPR; pemberitaan politik; strategi berbahasa*

PENDAHULUAN

Isu demonstrasi aksi penolakan tunjangan DPR 25—30 Agustus 2025 menimbulkan polemik mengenai cara media mengonstruksi realitas aksi tersebut melalui penggunaan bahasa-bahasa tertentu yang menghadirkan sudut pandang berita yang beragam. Di tengah polemik bahasa media ini, pemberitaan *detik.com* hadir dengan menampilkan penggunaan bahasa yang tampak menekankan aspek kerusuhan proses demonstrasi, seperti “membakar”, “menjebol”, dan “merangsek”. Penggunaan bahasa dalam berita *detik.com* tersebut menjadi penting untuk dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini terkait potensinya mengonstruksi makna dan membentuk persepsi tertentu terhadap aksi demonstrasi karena pada tahun 2025, *detik.com* menjadi portal media daring yang memperoleh 46% penggunaan mingguan dengan memegang 59% kepercayaan publik (Digital News Report 2025). Penggunaan bahasa yang menekankan aspek kerusuhan aksi dapat dipahami sebagai bagian dari proses *framing* pemberitaan media. Media berkapasitas untuk memilih peristiwa yang ingin diberitakan, sumber kutipan yang digunakan, dan mendefinisikan aktor-aktor melalui penggunaan bahasa dalam pembingkaihan untuk menentukan pemahaman masyarakat dari perspektif tertentu (Eriyanto 2012).

Salah satu bentuk dari proses *framing* media adalah pemfokusan berita pada satu aspek atau pihak tertentu (Eriyanto 2012). Pemfokusan ini berpotensi menghadirkan perbedaan proporsi pada narasi pemberitaan dengan lebih banyak menyoroti aspek atau pihak yang ingin ditekankan tersebut. Berita yang terfokus pada satu pihak menyebabkan pihak utama tersembunyi (Eriyanto 2012). Pemberitaan *detik.com* cenderung menyoroti peristiwa kerusuhan yang terjadi selama proses aksi demonstrasi, sementara latar belakang dan tuntutan aksi mendapatkan proporsi yang relatif terbatas. Penonjolan pada suatu aspek tertentu dengan bahasa tertentu dalam pemberitaan membuat aspek tersebut menjadi lebih bermakna dan diingat oleh masyarakat (Eriyanto 2012). Kondisi tersebut membuat aspek-aspek yang tidak terlalu ditampilkan dalam berita menjadi tidak diperhatikan oleh masyarakat (Palulungan et al. 2020), termasuk aspek latar belakang dan tuntutan aksi di tengah pemfokusan aspek kerusuhan massa.

Framing merupakan proses penyeleksian aspek-aspek tertentu dari sebuah realitas untuk memengaruhi pemahaman seseorang karena pada praktiknya, media tidak hanya menyampaikan sebuah berita, tetapi juga membentuk persepsi dan opini publik terhadap suatu peristiwa (Laksono and Hidayat 2025). Realitas isu yang ditonjolkan media cenderung lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga memengaruhi pemahamannya (Suharyo 2021). Dalam hal ini, *framing* dalam pemberitaan *detik.com* berpotensi memengaruhi pandangan masyarakat dalam memahami realitas aksi penolakan tunjangan DPR. Berhasilnya komunikasi politik, dalam konteks ini melalui *framing*, terhadap suatu isu maka dapat diartikan bahwa mayoritas masyarakat menyetujui isu tersebut dan sejalan dengan tujuan yang disampaikannya (Sarihati, Luthfie, and Kurniadi 2019). Dalam penelitian ini, *framing* dalam pemberitaan *detik.com* tersebut berpotensi memengaruhi arah pandang masyarakat untuk sejalan dengan bingkai tersebut. Dengan demikian, aksi demonstrasi serta para demonstran berpotensi dibingkai dalam konteks kekacauan melalui kurangnya penekanan terhadap substansi tuntutan demonstrasi (Darmawan, Arief, and Ayodya 2025).

Media berpotensi menghadirkan polarisasi sosial masyarakat yang disebabkan oleh *framing* dalam beritanya (Pitono and Dharmawan 2025). Dalam polarisasi tersebut, masyarakat dapat melihat bahwa demonstrasi yang berlangsung secara destruktif akan dianggap merugikan (Iriansyah 2025). Sementara itu, demonstrasi juga dapat dipandang sebagai bagian dari HAM yang perlu dibela (Iriansyah 2025), terutama jika pemberitaan media menekankan kedamaian dan dukungan atas aksi tersebut (Pitono and Dharmawan 2025). Hal tersebut berpotensi pada terbentuknya fenomena *echo chamber*: kondisi masyarakat terpapar suatu pemberitaan yang memperkuat opini mereka, tanpa diimbangi dengan pandangan alternatif dan keobjektifan pemberitaan (Jasmine et al. 2022; Pitono and Dharmawan, 2025). *Framing* dapat menentukan dan membatasi pandangan seseorang terhadap suatu hal melalui penyampaian informasinya (Satrivi and Purnama 2021). Dalam konteks ini, salah satunya terhadap isu demonstrasi yang mungkin bisa terjadi, bahkan lebih besar ke depannya untuk menyampaikan aspirasi terkait suatu kebijakan.

Analisis *framing* merupakan analisis yang digunakan untuk melihat realitas, pesan, atau peristiwa dikonstruksi dan dibentuk oleh media (Wibisono 2021). Melalui analisis *framing*, berita daring *detik.com* dapat dianalisis terkait penyeleksian dan pembingkaihan dalam pemberitaannya dengan menyoroti aspek tertentu dari isu aksi penolakan tunjangan DPR. Tindak *framing* media dilakukan dengan penggunaan perangkat tertentu, seperti *headline*, pengulangan, penggunaan gambar, label, dan asosiasi terhadap simbol generalisasi, dll. (Eriyanto 2012).

Sejumlah penelitian *framing* pemberitaan demonstrasi di Indonesia, seperti penelitian Pitono and Dharmawan (2025), Hamna and Dewanty (2023), dan Innayah and Umam (2020) telah mengkaji perbedaan sudut pandang dan kecenderungan keberpihakan media dalam pemberitaan aksi politik. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menggunakan model analisis *framing* Pan dan Kosicki untuk menganalisis struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik pada tingkat makro (struktur *framing* secara umum). Namun, analisis *framing* yang dilakukan belum menelaah secara rinci terkait penggunaan unsur-unsur bahasa, seperti diksi, frasa, klausa, kalimat, koherensi, dan tema, terutama pada struktur sintaksis, tematik, dan retorik teks berita. Selain itu, kajian *framing* yang secara khusus menganalisis pemberitaan aksi penolakan tunjangan DPR masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis penggunaan bahasa dalam pemberitaan *detik.com* terhadap aksi penolakan menggunakan model analisis *framing* Pan dan Kosicki.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana *detik.com* menggunakan bahasa untuk membingkai aksi penolakan tunjangan DPR. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan bahasa yang digunakan *detik.com* dalam membingkai aksi penolakan tunjangan DPR melalui empat struktur *framing* Pan dan Kosicki, yakni sintaksis, skrip, tematik, dan retorik serta (2) menjelaskan bagaimana penggunaan bahasa tersebut berkontribusi membentuk makna tertentu dalam konstruksi media mengenai aksi protes sosial tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis *framing* berbasis model *framing* Pan dan Kosicki. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu fenomena melalui proses interpretasi terhadap data teks (Creswell and Creswell 2023). Pendekatan tersebut digunakan untuk membantu pengkajian secara mendalam terhadap *framing* yang dibentuk melalui penggunaan bahasa dalam teks berita *detik.com* dan implikasinya terhadap pengonstruksian makna mengenai realitas aksi penolakan tunjangan DPR. Peneliti berperan sebagai penganalisis yang menginterpretasikan teks berita untuk memahami makna yang dikonstruksi melalui penggunaan bahasa dalam empat struktur *framing* (sintaksis, skrip, tematik, dan retorik) pada pemberitaan *detik.com*.

Data dalam penelitian ini berupa berita yang diterbitkan oleh *detik.com* pada periode 25—30 Agustus 2025. Pemilihan berita dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kriteria utama, yakni (1) periode terbit berita berada pada rentang waktu 25—30 Agustus 2025, (2) pemfokusan berita pada pembahasan aksi penolakan tunjangan DPR, (3) mengandung unsur *framing* yang dapat diidentifikasi melalui penggunaan bahasa yang merepresentasikan konflik dengan menggunakan struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik model *framing* Pan dan Kosicki, dan (4) peliputan berita tidak bersifat duplikasi. Dari keempat kriteria tersebut, terpilih lima berita yang memperlihatkan penggunaan bahasa dalam pemberitaan *detik.com* yang membingkai momentum berlangsungnya demonstrasi penolakan tunjangan DPR dan telah mencapai data jenuh, yakni berita lainnya yang ditemukan tidak lagi menghadirkan *framing* baru (Sugiyono 2019) sehingga mendukung analisis *framing* secara komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan simak catat (Saat and Mania 2020; Mahsun 2017) dengan menelusuri berita daring *detik.com* menggunakan kata kunci “Demonstrasi DPR RI” pada periode 25—30 Agustus 2025. Berita-berita yang ditemukan kemudian dilakukan observasi awal untuk menilai kesesuaiannya dengan kriteria penelitian (Rahmawati and Assidik 2025), yakni pembatasan periode, kefokusannya, keberadaan unsur *framing* melalui penggunaan bahasa yang dapat dikaji menggunakan empat struktur *framing* Pan dan Kosicki, serta kejenuhan data. Dalam observasi tersebut, peneliti mengidentifikasi penggunaan bahasa melalui diksi, frasa, klausa, kalimat, koherensi, dan tema pada keempat struktur *framing* Pan dan Kosicki. Berita yang memenuhi kriteria kemudian didokumentasikan, baik dalam bentuk salinan digital maupun daftar yang mencakup judul dan tautan sumber. Setelah itu, peneliti melakukan simak catat dengan mencermati isi berita dan penggunaan bahasa (diksi, frasa, klausa, kalimat, koherensi, dan tema) untuk dilakukan penganalisisan lebih lanjut sesuai dengan kerangka model analisis *framing* Pan dan Kosicki.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi investigasi melalui diskusi mendalam (*peer debriefing*) bersama pakar analisis wacana dan rekan sejawat dalam membedah serta menganalisis objektivitas kategorisasi bahasa pada struktur *framing* teks berita (Arianto 2024). Seluruh proses analisis teks berita didokumentasikan untuk menjamin dependabilitas penelitian.

Tabel 1. Judul Berita Aksi Penolakan Tunjangan DPR Periode Agustus 2025

| No. | Tanggal Terbit | Judul Berita <i>detik.com</i> |
|-----|-----------------|---|
| 1. | 25 Agustus 2025 | Massa Demo 25 Agustus Berhasil Dobrak Pintu DPR, Masuk Lalu Bakar Motor |
| 2. | 29 Agustus 2025 | Demo di Pontianak Memanas, Massa Bakar Pos Polisi-Rusak Fasum |
| 3. | 29 Agustus 2025 | Motor-Mobil di Parkiran DPRD Makassar Dibakar Massa, Ada Ledakan Bertubi-tubi |
| 4. | 30 Agustus 2025 | Rusuh! Massa Demo di Brebes Bakar Ruang DPRD-Rusak Polres |
| 5. | 30 Agustus 2025 | Suasana Kawasan DPR Usai Demo Ricuh: Tembok Dicoret-Pagar Rusak |

(Sumber: *detik.com*)

Data dianalisis dengan menggunakan model *framing* Pan dan Kosicki yang mempunyai empat struktur, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik (Eriyanto 2012). Struktur sintaksis menganalisis cara fakta disusun, mulai dari judul, *lead*, latar informasi, kutipan, dan penutup. Struktur skrip menganalisis cara fakta dikisahkan melalui kelengkapan 5W+1H berita. Struktur tematik menganalisis cara fakta dituliskan melalui paragraf, tema, proposisi, dan koherensi antarkalimat. Struktur retorik menganalisis cara fakta ditekankan melalui penggunaan kata, idiom, dan grafis. Keempat struktur dalam model tersebut secara kolektif membantu tujuan penelitian untuk dapat menganalisis secara mendalam terkait *framing* berita *detik.com* dalam menggambarkan aksi penolakan tunjangan DPR. Fokus utama mengacu pada penggunaan bahasa yang dapat memengaruhi pandangan masyarakat terkait isu aksi penolakan tunjangan DPR yang sedang terjadi. Keterkaitan antarstruktur ini menunjukkan bahwa tindak *framing* media tidak hanya dianalisis melalui permukaan berita saja, tetapi juga dapat dideskripsikan melalui fenomena bahasanya dengan menafsirkan makna-makna tertentu di baliknya.

Tabel 2. Skema Model *Framing* Pan & Kosicki

| Struktur | Perangkat <i>Framing</i> | Unit yang Diamati |
|------------------------------------|---|--|
| Sintaksis (Cara Menyusun Fakta) | Skema Berita | <i>Headline</i> , <i>lead</i> , latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, dan penutup. |
| Skrip (Cara Mengisahkan Fakta) | Kelengkapan Berita | 5W + 1H |
| Tematik (Cara Menulis Fakta) | Detail, koherensi, bentuk kalimat, dan kata ganti | Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antarkalimat. |
| Retorik (Cara Menekankan Fakta) | Leksikon, grafis, dan metafora | Kata, idiom, gambar atau foto, dan grafik. |

(Diadaptasi dari buku *Analisis Framing* oleh Eriyanto, 2012)

HASIL

Analisis *framing* dilakukan berdasarkan judul, isi, dan bahasa berita yang digunakan di dalamnya. Berikut analisis *framing* pemberitaan aksi penolakan tunjangan DPR menggunakan model analisis *framing* Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki.

1. Struktur Sintaksis Pemberitaan Penolakan Tunjangan Anggota DPR *Detik.com*

Analisis pada sintaksis ditinjau dari bentuk bahasa yang digunakan dalam skema berita.

Tabel 3. Hasil Analisis Struktur Sintaksis Berita 1—5

| Unit | Hasil Temuan |
|-----------------|--|
| <i>Headline</i> | <p>Berita 1 Massa Demo 25 Agustus “Berhasil Dobrak Pintu DPR, Masuk Lalu Bakar Motor”</p> <p>Berita 2 Demo di Pontianak Memanas, “Massa Bakar Pos Polisi-Rusak Fasum”</p> <p>Berita 3 Motor-Mobil di Parkiran DPRD Makassar Dibakar Massa, “Ada Ledakan Bertubi-tubi”</p> <p>Berita 4 Rusuh! Massa Demo di Brebes “Bakar Ruang DPRD-Rusak Polres”</p> <p>Berita 5 Suasana Kawasan DPR Usai Demo Ricuh: “Tembok Dicoret-Pagar Rusak”</p> |

| | |
|-----------------------------|---|
| Lead | <p>Berita 1 Diwarnai kericuhan dan Massa tampak membakar satu unit sepeda motor.</p> <p>Berita 2 Merusak fasilitas umum (fasum) dan sepeda motor, hingga membakar pos polisi.</p> <p>Berita 3 Kericuhan yang terjadi di kantor DPRD Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), kian parah. Terbaru, massa membakar sejumlah sepeda motor dan mobil.</p> <p>Berita 4 Massa yang datang merusak Markas Polres Brebes hingga gedung DPRD dibakar.</p> <p>Berita 5 Menyoroti kondisi pascademonstrasi berupa kerusakan fasilitas umum, vandalisme, dan kerusakan pagar.</p> |
| Latar Informasi dan Kutipan | <p>Berita 1 Fokus menampilkan kondisi kerusakan aksi selama demonstrasi. Berita juga mengutip pernyataan Kapolres Metro Jakarta Pusat Susatyo, "Bapak-Ibu ini sudah tidak kondusif banyak pelajar, anak-anak kami. Kami bubarkan, karena aksinya sudah tidak kondusif."</p> <p>Berita 2 Menampilkan kondisi kerusakan selama demonstrasi. Berita juga menampilkan konteks tuntutan melalui pengutipan pernyataan seorang demonstran, "Tuntutan kami masih sama dengan yang kemarin menolak kenaikan gaji DPR. Tapi, ada tambahan, kami meminta agar Kapolresta Pontianak dicopot serta meminta keadilan untuk korban ojek online yang meninggal akibat dilindas oleh aparat." dan latar belakang aksi pada paragraf kedua, yakni "atas penolakan kenaikan gaji anggota DPR."</p> <p>Berita 3 Fokus menampilkan kondisi kerusakan aksi selama demonstrasi.</p> <p>Berita 4 Fokus menampilkan kondisi kerusakan aksi selama demonstrasi.</p> <p>Berita 5 Menampilkan kondisi pascademonstrasi, seperti coretan vandalisme, kerusakan pagar, tiang listrik hangus, kerusakan fasum, dan sampah yang berserakan.</p> |
| Penutup | <p>Berita 1 Polisi masih berusaha "memukul mundur massa".</p> <p>Berita 2 Setelah puas beraksi di Bundaran Tugu Digulis Untan, massa bergeser ke arah Ayani Megamall.</p> <p>Berita 3 Massa juga melakukan perusakan terhadap videotron.</p> <p>Berita 4 Aksi serupa akan digelar lagi pada Sabtu malam.</p> <p>Berita 5 Menggambarkan adanya upaya pemulihan kondisi di sekitar kawasan gedung DPR dan Jalan Gatot Subroto melalui narasi pembagian tugas antara mobil damkar dan PPSU membersihkan sisa-sisa sampah di jalan.</p> |

Pada struktur sintaksis, kelima berita menggunakan *headline* yang menekankan sisi kerusakan aksi. *Lead* berita memfokuskan perhatian awal pemberitaan pada tindak dan kondisi kericuhan para demonstran. Latar informasi berita 1, 3, dan 4 menampilkan kondisi kerusakan aksi, berita 2 juga menampilkan kondisi kerusakan, tetapi juga disertai penyajian konteks tuntutan dan latar belakang demonstrasi, sedangkan berita 5 menampilkan kondisi pascademo, seperti kerusakan dan vandalisme. Kutipan sumber pada berita 1 cenderung mengutamakan pernyataan dari pihak resmi, seperti Kapolres, sedangkan pada berita 2 menyajikan pernyataan tuntutan dari pihak demonstran. Pada bagian penutup, umumnya berita menyoroti kelanjutan aksi, seperti massa bergeser ke lokasi lain, merusak objek lain, dan rencana aksi serupa berikutnya serta upaya pengendalian dan pemulihan demonstrasi, seperti pemukulan mundur dari pihak kepolisian dan pembersihan sisa kericuhan oleh petugas.

2. Struktur Skrip Pemberitaan Penolakan Tunjangan Anggota DPR *Detik.com*

Analisis pada skrip ditinjau dari unsur 5W+1H yang digunakan untuk mengisahkan fakta dalam berita.

Tabel 4. Hasil Analisis Struktur Skrip Berita 1—5

| Unit | Hasil Temuan |
|--------------|---|
| <i>What</i> | <p>Berita 1 Mendobrak pintu kecil gedung DPR, membakar satu unit sepeda motor, dan melempari pos satpam menggunakan batu.</p> <p>Berita 2 Membakar pos polisi, merusak fasilitas umum, dan melakukan vandalisme.</p> <p>Berita 3 Menjebol pagar, membakar sejumlah sepeda motor, mobil, dan pos jaga DPRD. Lalu, merusak ATM dan videotron.</p> <p>Berita 4 Melempari kantor wakil rakyat dengan batu, memecahkan kaca kantor, menyerang kantor polisi, membakar ban bekas serta ruang rapat DPRD, dan menjarah peralatan kantor.</p> <p>Berita 5 Suasana kerusakan di kawasan DPR pascademonstrasi ricuh.</p> |
| <i>Who</i> | <p>Berita 1—5 Massa (demonstran)</p> |
| <i>Where</i> | <p>Berita 1 Belakang gedung MPR/DPR RI Jakarta.</p> <p>Berita 2 Kantor DPRD Kalbar, Bundaran Tugu Digulis Untan, dan pos polisi, Pontianak.</p> <p>Berita 3 Kantor DPRD Makassar dan Jalan AP Pettarani.</p> <p>Berita 4 Kantor DPRD Brebes dan Mapolres Brebes.</p> <p>Berita 5 Kawasan depan gedung MPR/DPR RI dan Jalan Gatot Subroto.</p> |
| <i>When</i> | <p>Berita 1 25 Agustus 2025</p> <p>Berita 2 29 Agustus 2025</p> <p>Berita 3 29 Agustus 2025</p> <p>Berita 4 30 Agustus 2025</p> <p>Berita 5 30 Agustus 2025</p> |
| <i>Why</i> | <p>Berita 1, 3, 4, dan 5 Unsur <i>why</i> tidak ditampilkan secara eksplisit dalam teks berita.</p> <p>Berita 2 Menolak kenaikan gaji anggota DPR, meminta Kapolresta Pontianak dicopot, dan meminta keadilan untuk korban ojek <i>online</i> yang meninggal akibat dilindas oleh aparat.</p> |
| <i>How</i> | <p>Berita 1 Setelah berhasil mendobrak pintu kecil gedung DPR, massa langsung membakar satu unit motor. Mereka turut melempari pos satpam menggunakan batu. Saat mendekati mobil pengurai, massa melemparkan barang ke arah polisi.</p> <p>Berita 2 Menjelang magrib, massa mulai anarkis. Mereka emosi ketika tidak dapat memasuki kantor DPRD. Namun, setibanya di Bundaran Tugu Digulis Untan, mereka melakukan vandalisme, mencabut tiang lampu, merusak fasilitas umum, dan merusak motor. Setelah puas, mereka bergeser ke arah Ayani Megamall dan membakar pos polisi di sana.</p> <p>Berita 3 Setelah berhasil menjebol pagar dan merangsek ke halaman gedung DPRD, massa membakar sejumlah sepeda motor, mobil, dan pos jaga. Mereka turut merusak ATM dan videotron di depan kantor DPRD.</p> <p>Berita 4</p> |

Setelah diperbolehkan masuk kantor DPRD, massa langsung melempari dan memecahkan kaca kantor dengan batu. Setelah puas, mereka bergerak ke Mapolres Brebes, lalu menyerang dengan lemparan batu. Kemudian, massa kembali ke kantor dewan dan membakar ban bekas dan ruang rapat. Sebagian dari mereka juga memanfaatkan situasi untuk menjarah peralatan kantor.

Berita 5

Seusai demonstrasi, tampak sejumlah jejak kericuhan, seperti rusaknya fasilitas umum, pagar, vandalisme, sampah, dan tiang listrik yang hangus.

Pada struktur skrip, kelima berita melaporkan lokasi dan waktu (hari dan tanggal) demonstrasi terjadi secara spesifik. Fokus pemberitaan umumnya menekankan apa yang dilakukan demonstran (*what*) dan bagaimana kronologi kericuhan tersebut terjadi (*how*), seperti mendobrak pintu, membakar kendaraan, merusak fasilitas umum, serta urutan aksi yang berlangsung di berbagai lokasi. Sementara itu, alasan atau latar tuntutan demonstrasi (*why*) terlihat pada satu berita, sedangkan empat berita lainnya tampak tidak menampilkan alasan atau latar tuntutan aksi secara eksplisit dalam pemberitaan. Pola ini menunjukkan bahwa kelima berita tersebut lebih memberitakan aspek kerusuhan aksi dan dampak kerusakan yang ditimbulkan.

3. Struktur Tematik Pemberitaan Penolakan Tunjangan Anggota DPR *Detik.com*

Analisis pada tematik ditinjau dari tema umum, subtema, dan koherensi antarkalimat yang digunakan untuk menarasikan fakta dalam berita.

Tabel 5. Hasil Analisis Struktur Tematik Berita 1—5

| Berita | Tema umum | Subtema | Koherensi |
|----------|--|--|---|
| Berita 1 | Aksi demonstrasi digambarkan sebagai aksi kericuhan massa. | Subtema 1: demonstran digambarkan melakukan kericuhan. Subtema 2: polisi digambarkan berupaya mengontrol keadaan. | Tidak ada. |
| Berita 2 | Aksi penolakan kenaikan gaji DPR digambarkan sebagai aksi kericuhan massa. | Subtema 1: aksi demonstran digambarkan tidak kondusif. Subtema 2: aksi demonstran digambarkan menuntut keadilan. | Koherensi pembeda: "Massa menggelar aksi demo atas penolakan kenaikan gaji anggota DPR RI dilakukan di Kantor DPRD Kalbar sejak sore dan berlangsung kondusif. Namun saat hendak dibubarkan, menjelang maghrib massa mulai anarkis." Koherensi penjelas: "Setibanya di Bundaran Tugu Digulis Untan, massa kemudian melakukan vandalisme. Massa mencabut tiang lampu di trotoar dan merusak fasilitas umum lainnya." "Setelah puas beraksi di Bundaran Tugu Digulis Untan, massa bergeser ke arah Ayani Megamall. Massa kemudian membakar pos polisi di pusat perbelanjaan terbesar di Pontianak itu." |
| Berita 3 | Aksi massa di DPRD Makassar digambarkan sebagai kericuhan. | Tidak ada. | Koherensi penjelas: "Tak hanya itu, massa juga membakar pos jaga DPRD Makassar. Selanjutnya, massa juga melakukan perusakan terhadap mesin ATM yang berada tak jauh dari pos jaga." |

| | | | |
|----------|--|---|--|
| | | | <p>Koherensi sebab akibat: <i>"Kebakaran di lokasi cukup hebat sebab massa membakar hampir seluruh kendaraan, baik yang di parkir di halaman depan maupun halaman belakang gedung DPRD Makassar."</i></p> |
| Berita 4 | Aksi demonstrasi digambarkan sebagai aksi kericuhan massa. | <p>Subtema 1: demonstrasi digambarkan menimbulkan kerusakan-kerusakan fisik. Subtema 2: DPRD Brebes digambarkan mengalami dampak selama demonstrasi.</p> | <p>Koherensi penjelas: <i>"Tidak lama setelah diperbolehkan masuk, massa langsung melempari kantor wakil rakyat dengan batu. Dengan luasa, peserta aksi demo memecahkan kaca kantor tersebut."</i></p> <p>Koherensi pembeda: <i>"Massa pun langsung mundur menghindari paparan gas air mata. Namun tidak lama, mereka menyerang kembali dengan menghujani batu."</i></p> |
| Berita 5 | Penggambaran kondisi pascademonstrasi. | Tidak ada. | <p>Koherensi sebab akibat: <i>"Demonstrasi yang digelar di gedung MPR/DPR RI hingga dini hari menyebabkan sejumlah fasilitas umum rusak."</i></p> <p>Koherensi penjelas: <i>"Sampah sisa demo semalam terlihat menumpuk dan berserakan. Sejumlah coretan vandalisme juga tampak di sepanjang Jalan Gatot Subroto."</i></p> |

Pada struktur tematik, tema umum yang diangkat dalam kelima berita tersebut menekankan kericuhan aksi demonstrasi. Empat berita menggambarkan demonstrasi sebagai peristiwa kerusuhan, sementara berita lima menggambarkan kondisi pascademonstrasi. Koherensi pembeda menyoroti perubahan situasi dalam proses demonstrasi. Koherensi penjelas memperjelas aksi kerusuhan. Koherensi sebab akibat menggambarkan hubungan antara tindakan massa dan konsekuensi yang ditimbulkan. Secara keseluruhan, kelima pola pemberitaan menunjukkan bahwa berita lebih menggambarkan sisi kericuhan aksi dan dampak yang ditimbulkan.

4. Struktur Retoris Pemberitaan Penolakan Tunjangan Anggota DPR *Detik.com*

Analisis pada retorik ditinjau dari penggunaan gaya bahasa yang digunakan untuk menekankan fakta dalam berita.

Tabel 6. Hasil Analisis Struktur Retoris Berita 1—5

| Berita | Bentuk Bahasa |
|----------|---|
| Berita 1 | <p>Klausa: <i>Api dan asap hitam membubung tinggi</i> <i>Gas air mata ditembakkan</i> <i>Memukul mundur massa</i></p> |
| Berita 2 | <p>Frasa: <i>Setelah puas beraksi</i> Kalimat: <i>Anggota kepolisian pun mendorong mundur massa dengan berbagai cara terukur.</i> Idiom: <i>Pasukan bertameng</i></p> |
| Berita 3 | <p>Klausa: <i>Terdengar ledakan hebat secara bertubi-tubi.</i></p> |
| Berita 4 | <p>Diksi</p> |

Memecahkan, menyerang, merengsek, dan menjarah.

Kalimat:

Tidak lama setelah diperbolehkan masuk, massa langsung melempari kantor wakil rakyat dengan batu.

Puas merusak Kantor DPRD, mereka bergerak ke Mapolres Brebes yang berjarak 200 meter.

Di kantor polisi, pendemo yang sebagian besar kalangan remaja langsung menyerang dengan lemparan batu.

Berita 5 **Frasa:**

Coretan vandalisme, pagar rusak, sisa sampah, dan jalanan yang kotor.

Pada struktur retorik, tampak penggunaan bahasa yang menggambarkan suasana dan rangkaian peristiwa dalam demonstrasi yang cenderung ricuh. Bahasa yang digunakan memiliki dua perspektif, yakni tindakan yang dilakukan oleh demonstran dan tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Selain itu, bahasa juga digunakan untuk menggambarkan kondisi dan dampak fisik dari aksi tersebut. Secara keseluruhan, pilihan kata dan penyusunan kalimat dalam berita-berita tersebut berfokus pada penggambaran keriuhan situasi demonstrasi.

PEMBAHASAN

1. Sintaksis

Berdasarkan struktur sintaksis, pemberitaan *detik.com* menggambarkan aksi penolakan melalui konsistensi penggunaan bahasa yang menyoroti sisi keriuhan pada **judul** beritanya, seperti diksi *Rusuh!*, *Bakar*, dan *Rusak* dalam klausa “Berhasil Dobrak Pintu DPR, Masuk Lalu Bakar Motor” dan kalimat “Massa Bakar Pos Polisi-Rusak Fasum”. Bentuk bahasa pada judul-judul tersebut dapat dipahami sebagai strategi bahasa yang berpotensi memengaruhi pandangan awal masyarakat dengan membingkai aksi penolakan sebagai aksi yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum. Hal ini sejalan dengan penelitian Arum and Suryanto (2025) dan Lumenta, Turangan, and Rantung (2024) yang menyatakan bahwa penggunaan bahasa kontroversial pada judul berdampak pada pembentukan persepsi masyarakat. Penggunaan bahasa serupa terlihat dalam konteks penggalan judul berita, seperti frasa “*usai demo ricuh*” dan klausa “*pagar rusak*” yang menghadirkan gambaran “jejak keriuhan” dan berpotensi mengarahkan pemaknaan aksi dalam bingkai keriuhan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Caesarannisa (2025) bahwa struktur sintaksis dalam berita tidak sekadar bersifat teknis, tetapi juga tempat makna diproduksi, dipertahankan, dan distabilkan yang dalam pemberitaan dapat memengaruhi respons masyarakat. Hal tersebut konsisten dengan teori *framing* Pan and Kosicki (1993) yang menyatakan bahwa berita dipandang memiliki perangkat-perangkat simbolik yang terorganisir yang berinteraksi dengan memori individu untuk mengonstruksi makna.

Penggunaan bahasa juga tampak pada narasi *lead* berita, seperti klausa “*diwarnai keriuhan*” dan “*membakar pos polisi*”. Bentuk bahasa tersebut menampilkan fokus berita pada aspek keriuhan demonstrasi sehingga berpotensi memengaruhi pemaknaan aksi penolakan tunjangan DPR dalam bingkai keriuhan massa. Terlebih, kehadiran frasa “*kian parah*” dan diksi “*terbaru*” membangun narasi eskalasi yang menampilkan perkembangan keriuhan aksi yang berlanjut. Konstruksi *lead* tersebut menunjukkan bahwa pembingkai berita melalui penggunaan bahasa-bahasa tertentu berpotensi memengaruhi pemaknaan terhadap suatu realitas, sejalan dengan Eriyanto (2012) yang mengemukakan bahwa *framing* menentukan suatu realitas dipahami oleh masyarakat. Pola ini tampak konsisten dengan penyajian **latar informasi** berita yang fokus menampilkan kondisi kerusuhan aksi, mulai dari mendobrak, membakar, dan melempari.

Lebih lanjut, penyajian berita dengan mengutip pernyataan dari pihak Kapolres Metro Jakarta Pusat Susatyo menampilkan aksi demonstrasi yang dipandang tidak kondusif melalui otoritas kepolisian. Pernyataan ini mendukung sudut pandang ketidakkondusifan aksi dalam narasi pemberitaan. Sejalan dengan pernyataan Pan and Kosicki (1993) bahwa berita dapat mengaitkan sudut pandang yang dihadirkan dengan otoritas melalui pengutipan dari sumber resmi. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan proporsi dalam menyajikan gagasan demonstran. Pada berita 2, dari total 6 paragraf, 1 paragraf menghadirkan pandangan demonstran, sementara paragraf-paragraf lainnya membahas kerusuhan selama proses demonstrasi. Hal ini mengakibatkan ruang gagasan bagi demonstran yang menuntut keadilan relatif terbatas dalam pemberitaan. Selanjutnya, penggunaan bahasa pada bagian **penutup** berita, seperti frasa “*aksi serupa*” dan kalimat “*Setelah puas beraksi di Bundaran Tugu Digulis Untan, massa bergeser ke arah Ayani Megamall*” berpotensi mengarahkan perhatian masyarakat perihal keamanannya dengan menempatkan demonstrasi dalam bingkai

kerawanan situasional. Sama halnya dengan koherensi penjelas pada berita 3, klausa “*melakukan perusakan terhadap videotron*” pada bagian penutup membingkai perluasan objek perusakan kepada fasilitas umum, seperti videotron tersebut. Oleh karena itu, indikasi kerawanan situasional terkait kerusuhan dalam pemberitaan tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Pitono and Dharmawan (2025) yang menyebutkan bahwa pembingkai media yang terlalu fokus menyoroti bentuk kerusuhan demonstrasi akan menimbulkan ketakutan pada diri masyarakat untuk ikut serta secara langsung. Selain itu, terdapat juga klausa beridiom *berusaha “memukul mundur massa”* yang menggambarkan polisi sebagai pihak yang berusaha mengondisikan situasi aksi agar tetap terkendali. Namun, adanya klausa tersebut cenderung menempatkan demonstran sebagai pihak yang perlu ditangani karena tindakan mendobrak pintu DPR, melampiri pos, dan membakar motor di sekitar jalan.

Penelitian ini memberikan fokus dengan menganalisis penggunaan bahasa dalam struktur sintaksis yang selama ini digunakan media dalam membangun skema berita yang sarat akan makna bingkai tertentu. Bahasa yang digunakan tidak sekadar alat komunikasi realitas aksi, tetapi juga sebagai alat untuk menyoroti aspek-aspek tertentu, terutama membingkai aksi penolakan tunjangan DPR sebagai peristiwa kericuhan massa. Dengan demikian, penggunaan bahasa dalam struktur sintaksis pemberitaan aksi penolakan tunjangan DPR menunjukkan bahwa media memiliki peran dan pengaruh strategis dalam membentuk pandangan awal masyarakat melalui konsistensi diksi, frasa, klausa, dan kalimat yang menggambarkan kericuhan aksi pada judul, *lead*, latar informasi, dan penutup beritanya.

2. Skrip

Berdasarkan struktur skrip, empat berita tidak menampilkan unsur *why* ‘mengapa demonstran turun ke jalan’ secara eksplisit yang berpotensi mereduksi makna demonstrasi. Ketika unsur *why* tidak ditampilkan dalam suatu berita, terjadi pemaknaan lain terhadap berita tersebut Eriyanto (2012). Dalam konteks ini, makna demonstrasi lebih dipersepsikan sebagai aksi yang menimbulkan dampak atau konsekuensi pada kerusakan materi. Ketidakhadiran informasi alasan dan tujuan aksi dalam berita berpotensi membatasi pandangan masyarakat karena mereka memahami peristiwa dari permukaan berita, tanpa adanya pemahaman terhadap esensi aksi penolakan tunjangan DPR. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Palulungan et al. (2020) yang mengatakan bahwa aspek-aspek tertentu yang tidak diberitakan oleh media akan dilupakan oleh masyarakat. Sementara itu, berita 2 tampak menyajikan unsur *why* ‘mengapa demonstran turun ke jalan’ melalui penyebutan pada paragraf kedua dan kutipan seorang demonstran, tetapi secara singkat di tengah mayoritas narasi kerusuhan dalam berita. Oleh karena itu, kelima berita tersebut cenderung membingkai aksi penolakan dari sisi kericuhan aksi.

Temuan mengenai ketidakhadiran unsur *why* dan pemfokusan pada unsur *what* dan *how*, seperti “*merusak*”, “*membakar*”, dan “*menyerang*” dalam pemberitaan menunjukkan bahwa *framing* dapat dibangun melalui pengaturan alur cerita sehingga demonstrasi lebih dipahami sebagai rangkaian kericuhan, bukan penyampaian aspirasi tuntutan. Serupa dengan penelitian Aharoni (2025) yang menunjukkan bahwa retorika tekstual ala wacana perang dapat memberikan jarak dan menghalangi pemahaman terkait tujuan demonstran dan demonstrasi. Kesimpulan ini sejalan dengan Pinontoan and Wahid (2020), media dapat mengonstruksi suatu peristiwa yang dianggap penting oleh mereka. Penelitian ini memberikan fokus dengan menganalisis secara lengkap tatanan kelengkapan berita pada struktur skrip yang digunakan oleh media dalam membentuk *framing* terkait isu demonstrasi. Dengan demikian, analisis pada struktur skrip pemberitaan aksi penolakan tunjangan DPR menunjukkan bahwa media memiliki kapasitas untuk menyusun dan menyeleksi aspek-aspek tertentu yang dirasa penting dan yang tidak dirasa penting dalam suatu pemberitaan isu politik.

3. Tematik

Berdasarkan struktur tematik, tampak pola konsisten yang menampilkan tema kericuhan demonstrasi penolakan tunjangan DPR. Di dalam pemberitaan, anggota DPR direpresentasikan sebagai pihak yang mengalami dampak melalui penekanan pada aspek kericuhan demonstrasi terhadap fasilitas negara. Hal tersebut terbentuk dari proses penyeleksian terhadap elemen realitas demonstrasi lainnya sehingga paragraf-paragraf dalam berita fokus menyoroti ragam kericuhan, seperti *menyerang*, *merengsek*, dan *menjarah*. Sebagaimana penelitian Suci et al. (2025), *framing* memperlihatkan cara media menyeleksi aspek tertentu untuk ditekankan pada konteks pemberitaannya. Konstruksi realitas aksi ini berpotensi membatasi masyarakat untuk melihat aspek lainnya, seperti alasan atau tujuan demonstrasi karena fokusnya tertuju pada aspek kericuhan aksi. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Kartini et al. (2020), media memahami bahwa berita

adalah bingkai yang dapat membatasi pemahaman seseorang yang membacanya. Penelitian Qonitah, Gemiharto, and Masrina (2025) menyatakan bahwa *framing* yang terbentuk dalam pemberitaan tidak hanya mencerminkan pandangan media, tetapi juga membentuk suatu realitas sosial yang dipandang benar oleh masyarakat.

Berita 1 memiliki 2 subtema: subtema 1 *demonstran digambarkan melakukan kericuhan* dan subtema 2 *polisi digambarkan berupaya mengontrol keadaan*. Subtema 1 diuraikan melalui bentuk-bentuk kericuhannya, sedangkan subtema 2 disajikan melalui paragraf yang menggambarkan usaha polisi dalam menangani proses demonstrasi, seperti *memukul mundur massa*, *menembakkan gas air mata*, dan *mendorong masa menjauh*. Kehadiran subtema 2 memperjelas bingkai kericuhan demonstrasi aksi melalui penggambaran penanganan polisi terhadap kericuhan tersebut.

Berita 2 mengandung 2 subtema: subtema 1 *aksi demonstran digambarkan tidak kondusif* dinyatakan secara rinci yang menggambarkan ketidakkondusifan demonstrasi, sedangkan subtema 2 *aksi demonstran digambarkan menuntut keadilan* dinyatakan dengan mengutip singkat pernyataan seorang demonstran. Perbedaan proporsi narasi yang menggambarkan kericuhan dengan tuntutan demonstrasi berpotensi membatasi ruang pemahaman terhadap pokok tuntutan. Berita ini juga tampak menggunakan bentuk deduktif yang menjadikan *lead* beritanya sebagai inti pemberitaan sehingga paragraf-paragraf lainnya difungsikan sebagai keterangan *lead* tersebut. Berita ini turut mengandung koherensi pembeda yang menggambarkan perubahan situasi melalui diksi "*kondusif*" menjadi "*anarkis*" dengan narasi pembubaran sebagai titik transisinya. Koherensi penjelas memperlihatkan aksi penolakan sebagai rangkaian kericuhan yang bereskalasi.

Berita 3 menghadirkan tema *aksi massa di DPRD Makassar digambarkan sebagai kericuhan* melalui penggunaan bahasa yang menampilkan intensitas visual yang tinggi. Hal tersebut ditampilkan melalui narasi ledakan bertubi-tubi dan kebakaran yang cukup hebat. Dalam berita ini, ditemukan bentuk koherensi penjelas yang menunjukkan adanya perluasan objek kerusakan, yakni fasilitas umum (ATM) di sekitarnya. Sementara itu, koherensi sebab akibat menunjukkan bahwa narasi kekacauan aksi ditampilkan melalui bingkai pembakaran hampir seluruh kendaraan oleh massa.

Berita 4 mempunyai 2 subtema: subtema 1 *demonstrasi digambarkan menimbulkan kerusakan-kerusakan fisik* dijelaskan melalui ragam kerusakan aksi, mulai dari demonstran yang diperbolehkan masuk hingga melakukan kerusakan di dalam gedung DPRD dan kantor Mapolres Brebes. Kemudian, subtema 2 secara implisit merepresentasikan pihak DPRD Brebes digambarkan mengalami dampak selama demonstrasi melalui konstruksi narasi mengenai kantornya yang rusak, terbakar, dan terjarah setelah adanya perizinan masuk. Subtema ini menampilkan fokus pemberitaan pada pembingkai demonstran sebagai pihak yang digambarkan melakukan kerusakan melalui pola narasi yang tampak dominan dalam berita. Pola seperti ini sejalan dengan Pitono and Dharmawan (2025) yang menyebutkan bahwa pembingkai media dapat berpotensi mengalihkan fokus masyarakat dari inti isu permasalahan. Dalam pemberitaan ini, pembingkai berita melalui deskripsi proses kericuhan aksi berpotensi menyebabkan pemahaman terhadap substansi aksi menjadi terbatas. Pada berita keempat ditemukan bentuk-bentuk koherensi, seperti koherensi penjelas menggambarkan bahwa perizinan akses ke kantor DPRD dibingkai sebagai awal dari momen eskalasi di lokasi yang lebih dekat dengan pusat kekuasaan. Koherensi pembeda menunjukkan pola aksi yang berulang melalui gambaran penyerangan kembali dari massa.

Berita 5 memperlihatkan tema *penggambaran kondisi pascademonstrasi*. Hal tersebut tampak melalui konstruksi narasi yang menampilkan jejak-jejak kericuhan pascakejadian aksi, seperti vandalisme, sampah yang berserakan, dan jalanan yang kotor karena pembakaran. Tema ini menampilkan kerusakan sebagai konsekuensi dari keberlangsungan demonstrasi. Selain itu, koherensi sebab akibat turut mengonstruksi bingkai yang mengaitkan aksi demonstrasi sebagai penyebab sejumlah kerusakan fasilitas umum dan koherensi penjelas memperluas dampak demonstrasi: tidak hanya tentang kebersihan kota, tetapi juga tentang tata tertib ruang kota.

Pemfokusan berita pada kericuhan aksi disertai penggambaran penanganan dari pihak polisi menjadi bagian dari bingkai narasi keamanan yang dihadirkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Suci et al. (2025) yang mengungkap bahwa pemerintah dan aparat membingkai narasi keamanan untuk membenarkan tindak represif mereka. Selain itu, bentuk-bentuk koherensi kalimat berita memperjelas kronologi kericuhan sehingga pemfokusan isi lebih kepada proses kericuhan dari aksi tersebut. Konstruksi narasi dan tema ini berpotensi membentuk polarisasi persepsi terhadap aksi penolakan yang ditampilkan melalui sisi kericuhannya. Sebagaimana penelitian Rusly and Suryandari (2025) mengungkapkan bahwa *echo chamber* merupakan kebiasaan seseorang dalam menerima informasi yang sesuai dengan pemahaman sebelumnya sehingga menyulitkan mereka untuk memandang suatu peristiwa secara objektif.

Temuan ini menunjukkan bahwa penyusunan tema dan koherensi paragraf yang menekankan kericuhan dan kerusakan fisik dibandingkan tuntutan demonstrasi berpotensi membangun *framing* aksi

sebagai kericuhan di ruang publik. Dengan demikian, analisis aspek bahasa berupa tema dan koherensi kalimat pada struktur tematik pemberitaan aksi penolakan tunjangan DPR ini menunjukkan bahwa melalui *framing* berita, media memiliki kapasitas untuk menarasikan aspek-aspek tertentu menjadi suatu ide pokok dan fokus bahasan dalam wacana politiknya sehingga dapat mengonstruksi makna tertentu. Koherensi kalimat berita yang digunakan dalam struktur tematik ini juga bukan sekadar alat penjelas kronologi peristiwa aksi, melainkan juga alat yang berpotensi memengaruhi legitimasi aksi demonstrasi melalui pemberitaan yang disajikan dalam berita.

4. Retoris

Berdasarkan struktur retoris, isi pemberitaan menggunakan bentuk diksi, frasa, klausa, dan kalimat yang berpotensi menimbulkan perbedaan makna. Penggunaan bahasa tersebut dapat memfokuskan dan mengasosiasikan aspek-aspek tertentu dari aksi demonstrasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmawati and Assidik (2025) yang menunjukkan bahwa *framing* bahasa dalam pemberitaan politik secara halus dan efektif memengaruhi pandangan masyarakat melalui konstruksi bahasa pada dimensi mikrostruktural (kalimat dan diksi) yang dapat membentuk makna tertentu. Rahmawati and Assidik (2025) juga menemukan bahwa penggunaan metafora atau asosiasi negatif melalui pilihan kata dapat menanamkan penilaian tertentu secara halus tanpa perlu memperlihatkan keberpihakan media secara eksplisit. Makna demonstrasi dalam berita-berita tersebut cenderung dikonstruksi dengan lebih menyoroti aspek kerusuhan dalam pemberitaan.

Berita 1 mengonstruksi demonstrasi salah satunya melalui penekanan pada aspek kesan ketegangan narasi dengan menghadirkan klausa hiperbol yang menggambarkan “*api dan asap hitam membubung tinggi*”. Klausa tersebut merujuk pada tindakan pembakaran satu unit motor oleh massa setelah mereka berhasil mendobrak pintu kecil gedung DPR dan memasukinya. Klausa lainnya yang menggambarkan tindakan aparat, seperti “*memukul mundur massa*” dan “*gas air mata ditembakkan*” mbingkai aparat sebagai aktor yang berupaya mengendalikan keadaan. Mereka mengatakan bahwa aksi sudah tidak kondusif dan melakukan perusakan sehingga dikomandokan untuk dibubarkan dan massa diharapkan untuk mundur. Narasi ini diperkuat oleh penggunaan elemen visual yang menampilkan terbakarnya motor di belakang gedung DPR sehingga kesan kerusuhan menjadi lebih menonjol dalam pemberitaan.

Massa Demo 25 Agustus Berhasil Dobrak Pintu DPR, Masuk Lalu Bakar Motor

Wildan Noviansah - detikJogja

Senin, 25 Agu 2025 15:45 WIB



Foto: Aksi demonstrasi di belakang gedung MPR/DPR RI, Jakarta, juga diwarnai kericuhan. Massa membakar satu unit motor. (Wildan N/detikcom)

Gambar 1. Visual pembakaran satu unit motor (sumber: *detik.com*)

Berita 2 mbingkai aksi seolah menjadi rangkaian peristiwa kerusuhan berulang dengan memberikan konteks “*puas beraksi*” yang merujuk pada tindakan-tindakan vandalisme massa di lokasi sebelumnya, yakni Bundaran Tugu Digulis Untan dan kelanjutan aksi pembakaran pos polisi setelahnya di Ayani Megamall. Selain itu, hadirnya kalimat “*anggota kepolisian pun mendorong mundur massa dengan berbagai cara terukur*” disertai idiom “*pasukan bertameng*” mbingkai penanganan demonstrasi yang ditampilkan melalui kesiapan aparat dengan strategi dan perlengkapan khusus. *Framing* ini tampak diperkuat oleh visualisasi terbakarnya pos polisi dan aktivitas massa di sekitar titik api yang menegaskan narasi kericuhan dalam pemberitaan.

Demo di Pontianak Memanas, Massa Bakar Pos Polisi-Rusak Fasum

Ocsya Ade CP - detikKalimantan

Jumat, 29 Agu 2025 20:07 WIB



Aksi demonstrasi di Bundaran Digulis Untan Pontianak. Foto: istimewa

Gambar 2. Visual terbakarnya pos polisi (sumber: *detik.com*)

Berita 3 menggunakan klausa hiperbol *“terdengar ledakan hebat secara bertubi-tubi”* yang membingkai efek dari pembakaran sejumlah motor dan mobil oleh massa sehingga membangun kesan ketegangan narasi pada pemberitaan. Elemen visual yang menampilkan kebakaran di area kantor DPRD Makassar memperkuat bingkai keriuhan dalam pemberitaan tersebut.

Motor-Mobil di Parkiran DPRD Makassar Dibakar Massa, Ada Ledakan Bertubi-tubi

Sahrul Alim - detikSulsel

Jumat, 29 Agu 2025 20:54 WIB



Foto: Unjuk rasa di depan kantor DPRD Makassar berakhir ricuh. Sahrul Alim/detikSulsel

Gambar 3. Visual demonstrasi di depan kantor DPRD Makassar (sumber: *detik.com*)

Berita 4 mengonstruksi demonstrasi bersikap mendesak dan mengambil paksa melalui klausa *“merengsek masuk”* dan *“menjarah peralatan kantor”*. Hadirnya ragam penggunaan bahasa yang menarasikan kerusuhan seolah menampilkan bahwa aspek tersebut menjadi realitas utama dari aksi sehingga berpotensi menggeser fokus pemberitaan dari aktor pembuat kebijakan dan substansi tuntutan. Selain itu, penyandingan kalangan usia dengan tindakan penyerangan dalam pemberitaan berpotensi membentuk stereotipe tertentu terhadap kalangan demonstran tersebut. Pembingkai keriuhan aksi dalam berita tampak diperkuat oleh penggunaan visual yang menampilkan kerusakan kantor DPRD Brebes dan terbakarnya barang-barang di jalan.

Rusuh! Massa Demo di Brebes Bakar Ruang DPRD-Rusak Polres

Imam Suropto - detikJateng
Sabtu, 30 Agu 2025 17:29 WIB



Situasi demo yang berlangsung ricuh di Brebes, Sabtu (30/8/2025). Foto: Imam Suropto/detikJateng



Situasi demo yang berlangsung ricuh di Brebes, Sabtu (30/8/2025). Foto: Imam Suropto/detikJateng

Gambar 4. Visual kerusakan ruang DPRD dan terbakarnya barang (sumber: *detik.com*)

Berita 5 memfokuskan pemberitaan pada jejak kerusakan sebagai hal yang disebabkan oleh demonstrasi melalui penekanan pada vandalisme, sampah, dan kerusakan pagar. Narasi tersebut diperluas dengan menghadirkan institusi publik, seperti PPSU dan mobil damkar sebagai aktor pemulih yang bekerja sama mengembalikan kondisi normal pascakericuhan demonstrasi. Melalui konstruksi bahasa-bahasa tersebut, aksi demonstrasi cenderung dilihat dalam bingkai kericuhan yang berkaitan dengan kerusakan-kerusakan fasilitas publik. Visualisasi coretan vandalisme di sekitar kawasan gedung DPR dan sampah-sampah di Jalan Gatot Subroto memperkuat bingkai pascakericuhan yang dibangun dalam pemberitaan.

Suasana Kawasan DPR Usai Demo Ricuh: Tembok Dicoret- Pagar Rusak

Brigitta Bella Permata Sari - detikNews
Sabtu, 30 Agu 2025 10:38 WIB



Suasana di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jaksel, Sabtu (30/8) pagi. (Brigitta Bella/detikcom)

Gambar 5. Visual kondisi pascademonstrasi berupa sampah dan coretan vandalisme di sekitar Gedung DPR RI (sumber: *detik.com*)

Melalui konsistensi penggunaan ilustrasi foto yang menyorot pada api dan kerusakan properti, kelima berita tersebut cenderung menonjolkan aspek visual destruktif yang berpotensi mengarahkan pemaknaan aksi dari sudut pandang visual tersebut. Sebagaimana pernyataan Wibisono (2021) bahwa jurnalis mendefinisikan realitas melalui cara pandangnya, pilihan kata yang digunakan dalam pemberitaan, dan pilihan gambar atau foto yang memperkuat persepsi publik terhadap suatu peristiwa. Pemberitaan yang lebih menyoroti tindak destruktif demonstrasi melalui kerusakan di ruang publik berpotensi membentuk ketegangan sosial. Hal ini sejalan dengan penemuan Iriansyah (2025) bahwa pembentukan citra negatif terhadap mahasiswa (yang melakukan unjuk rasa) oleh pemberitaan media dapat menimbulkan perpecahan sosial.

Temuan terkait penggunaan diksi, idiom, dan visual berkonotasi negatif dalam tubuh berita menampilkan pengasosiasian demonstran dengan kerusuhan serta kericuhan. Penggunaan bahasa tersebut memperlihatkan *framing* konflik dan kerusuhan yang ada dalam pemberitaan terhadap aksi penolakan. Penelitian ini memberikan fokus dengan menganalisis secara mendalam penggunaan bahasa dalam struktur retorik yang selama ini digunakan media dalam membangun citra dan bingkai asosiasi tertentu. Bahasa yang digunakan juga tidak sekadar alat komunikasi realitas aksi penolakan, tetapi juga sebagai alat untuk mengukuhkan citra, baik positif maupun negatif kepada pihak-pihak

yang terlibat dalam proses aksi tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Syauket et al. (2024) yang menyatakan bahwa dalam pembicaraan politik, bahasa sebagai komunikasi berperan sentral karena kemampuannya untuk membentuk realitas dan makna tertentu yang akan dipersepsikan masyarakat. Dengan demikian, analisis penggunaan bahasa dalam struktur retorik pemberitaan aksi penolakan tunjangan DPR ini menunjukkan bahwa media berperan dalam proses pembentukan asosiasi terhadap posisi aktor politik tertentu (demonstran dan DPR) melalui penggunaan bahasa berupa diksi, frasa, klausa, dan kalimatnya.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis *framing* terhadap lima berita aksi penolakan tunjangan DPR 25—30 Agustus 2025, dapat disimpulkan bahwa kelima pemberitaan *detik.com* membangun pola *framing* bahasa melalui penggunaan bahasa kerusuhan yang berulang dan berkonotasi negatif, seperti “anarkis”, “bakar”, “rusak”, dan “ricuh”, penekanan pada tema kerusuhan, serta pemberian porsi unsur *why* (alasan aksi demonstrasi) yang terbatas. Pola *framing* ini lebih menekankan demonstrasi sebagai kerusuhan massa sehingga terlihat membatasi ruang penyampaian alasan serta substansi tuntutan aksi. Dari sisi permukaan, kelima pemberitaan tampak faktual dan objektif, tetapi melalui mekanisme *framing* bahasa, pola tersebut cenderung membatasi pemahaman terhadap aksi penolakan sebagai konflik kerusuhan dan mengurangi penyorotan pada dimensi tuntutan dan keadilan sebagai ekspresi demokrasi politik. Temuan ini menunjukkan bahwa *framing* media tidak hanya bekerja pada level narasi makro pemberitaan, tetapi juga pada level mikrostruktural. Pola *framing* tersebut terbentuk melalui penggunaan bahasa yang sarat makna, struktur narasi, dan pengasosiasian aktor yang secara kolektif dapat memengaruhi persepsi terhadap isu demonstrasi.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya penerapan model *framing* Pan dan Kosicki dengan menekankan peran bahasa pada level mikro (diksi, frasa, klausa, kalimat, koherensi, dan tema) dalam pembingkai wacana politik. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi redaksi media dalam menggunakan bahasa dan menyusun narasi yang lebih proporsional serta berimbang sehingga pemberitaan aksi protes tetap dapat fokus menyoroti tuntutan substantif dan tidak mendelegitimasi demonstrasi secara sepihak melalui pemberitaannya. Secara sosial, temuan ini dapat berkontribusi sebagai rujukan awal bagi pemahaman kritis khalayak terhadap *framing* pemberitaan media.

Keterbatasan penelitian ini berada pada penganalisisan satu media dalam periode yang singkat dengan sampel yang terbatas. Hal tersebut membatasi penelitian ini menggeneralisasi temuan serta kesimpulan pada berita *detik.com* lainnya, media lain, dan konteks isu demonstrasi yang lebih luas. Analisis ini tidak dimaksudkan untuk melakukan penilaian normatif ataupun evaluatif terhadap pemberitaan *detik.com*, tetapi untuk melihat pola penekanan aspek tertentu dalam konstruksi narasi berita sebagai bagian dari analisis teks. Penelitian berikutnya dapat menyoroti perbedaan bingkai antarmedia dan menggabungkan teori analisisnya dengan model *framing* R. Entman untuk lebih memaknai ideologi dan tujuan media-media tersebut terhadap isu politik ataupun isu sosial lainnya.

REFERENSI

- Aharoni, Matan. 2025. “Aiming Close to Make a Change : Protest Coverage and Production in Online Media as a Process Toward Paradigm Shift.” *Journalism and Media* 6 (2), 78: 1–18.
- Arianto, Bambang. 2024. *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*. Serang: Borneo Novelty Publishing.
- Arum, Mei Sekar, dan Suryanto. 2025. “Analisis Wacana Kritis pada Ucapan Orang Tolol Sedunia Ahmad Sahroni dalam Dinamika Demonstrasi Publik.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan & Sosial Humaniora (MURADIK)* 1 (3): 16–31.
- Caesarannisa, Resna. 2025. “Membingkai Sunyi: Analisis Framing Kompas.com terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus.” *Senakom: Prosiding Seminar Nasional Komunikasi* 3 (1): 1–15.
- Creswell, John W., dan J. David Creswell. 2023. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Darmawan, Arief, Maulana Arief, dan Beta Puspitaning Ayodya. 2025. “Analisis Framing dalam Pemberitaan Website CNN Indonesia.com tentang Demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ Periode 21 Februari 2025.” *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi (SEMAKOM)* 3 (2):

- 622–25.
- Digital News Report. 2025. "Reuters Institute Digital News Report." 2025. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2025/indonesia>.
- Eriyanto. 2012. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Group.
- Hamna, Dian Muhtadiah, dan Natasyah Dewanty. 2023. "Analisis Framing Pemberitaan Tribun-timur.com tentang Demonstrasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar." *Journal of Communication Sciences* 5 (2): 85–94.
- Innayah, dan Choirul Umam. 2020. "Framing Pemberitaan Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja Komparasi pada Detik.com dan Republika.Co.ID." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 10 (1): 52–65.
- Iriansyah, Mochammad Nurdi. 2025. "'Demo Mahasiswa Sudah Kelewat Batas': Pengaruh Pemberitaan Media dan Persepsi Publik terhadap Ketahanan Sosial-Budaya di Kota Makassar." *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*. 8 (1): 42–55. <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i1.61430>.
- Jasmine, Khairina H.W, Kresna Faza R, M. Zhafran Haris, Rury Kharisma M, dan Yasmin Nayla A. 2022. "Fenomena Echo Chamber di Media Sosial dan Dampaknya terhadap Polarisasi Politik bagi Mahasiswa." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 9 (2): 121–130. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v9i2.y2022.p121-130>.
- Kartini, Rizki Mahyani Br Hasibuan, Nur Syhadah Sinaga, dan Awaliyah Rahmadina. 2020. "Metode Analisis Framing dalam Media Sosial." *Jurnal Edukasi Nonformal* 3 (2): 141–146.
- Laksono, Puji, dan M. Rohmad Hidayat. 2025. "Framing Media Pemberitaan Pengungsi Rohingya dalam Perspektif HAM di Majalah Tempo.Co." *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam* 10 (1): 19–38.
- Lumenta, Shintia J S, Doortje D Turangan, dan Cevonie M Rantung. 2024. "Peran Hukum dalam Mengatasi Media Massa yang Menyebarkan Berita Provokatif yang Menimbulkan Kegaduhan Masyarakat Ditinjau dari Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Lex Privatum* 14 (2): 1–11.
- Mahsun. 2017. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Palulungan, Lusia, M. Ghufuran H. Kordi K, Muhammad Taufan Ramli, Yudha Yunus, dan Ibrahim Fattah. 2020. *Mengubah Lewat Berita: Jurnalisme Berperspektif Perempuan, Anak, & Disabilitas*. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia.
- Pan, Zhongdang, dan Gerald M. Kosicki. 1993. "Framing Analysis: An Approach to News Discourse." *Political Communication*, 10 (1): 55–75.
- Pinontoan, Nexen Alexandre, dan Umaimah Wahid. 2020. "Analisis Framing Pemberitaan Banjir Jakarta Januari 2020 di Harian Kompas.Com dan Jawapos.Com." *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi* 12 (1): 11–24. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i1.9928>.
- Pitono, dan Awang Dharmawan. 2025. "Analisis Framing Media Narasi.Tv dan Viva.Co.Id dalam Pemberitaan Demonstrasi Peringatan Darurat Menolak Revisi Undang-Undang Pilkada 2024." *The Commercium* 9 (3): 27–37.
- Qonitah, Alifah, Ilham Gemiharto, dan Dwi Masrina. 2025. "Analisis Framing Pan dan Kosicki Pemberitaan Kebijakan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan Tahun 2024 di Kompas.com dan Tempo.co." *Jurnal Penelitian Inovatif* 5 (4): 2849–2860.
- Rahmawati, Ayu Nur, dan Gallant Karunia Assidik. 2025. "Bahasa, Kuasa, dan Pilpres 2024: Dekonstruksi Framing Mikrostruktural dalam Pemberitaan Solopos melalui Analisis Wacana Kritis Fairclough." *Jurnal Bahasa dan Sastra* 13 (1): 251–265. <https://doi.org/10.24036/jbs.v13i1.133291>.
- Rusly, Nur Fadia, dan Nikmah Suryandari. 2025. "Analisis Framing Negatif dan Pengaruhnya terhadap Stereotip Budaya dalam Media Sosial: Studi Kasus Kontroversi 'Rendang Hilang' oleh Conten Creator @Willie Salim di TikTok." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3 (2): 1–23. <https://ejournal.alhafiindonesia.co.id/index.php/JOUMI/article/view/432>.
- Saat, Sulaiman, dan Sitti Mania. 2020. *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Makassar: Pusaka Almaidia.
- Sarihati, Tati, Muhammad Luthfie, dan Budi Kurniadi. 2019. *Komunikasi Politik, Media Massa, dan Opini Publik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Satrivi, Nadila, dan Chandra Purnama. 2021. "Pembentukan Opini Publik Indonesia oleh Cable News Network (CNN) Indonesia Berkenaan dengan Isu Sampah Plastik." *Padjajaran Journal*

of International Relations (PADJIR) 3 (2): 228–241.

<https://doi.org/10.24198/padmir.v3i2.31172.33515>.

Suci, Neira Priyanka, Nazeli Riski Basanda, Najla, dan Zanika Zahiyatunnisa. 2025. “Kekerasan Negara terhadap Rakyat: Tinjauan HAM dalam Penanganan Aksi Demonstrasi.” *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 4 (1): 12–24.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharyo. 2021. *Kajian Bahasa dengan Pendekatan Analisis Framing*. Semarang: CV. Tigamedia Pratama.

Syauket, Amalia, Ratna Indriasari, Rahadi Budi Prayitno, Definitif Endrina Kartini Mendrofa, dan Cornelia Evelin Cabui. 2024. *Komunikasi Politik Pemerintahan*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.

Wibisono, Irawan. 2021. *Analisis Framing (dalam Berita Politik)*. Banyumas: Amerta Media.